



Vol. 03 No. 11 (2024) : 53 - 61

e-ISSN: 2964-0131

p-ISSN-2964-1748

UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN

e-ISSN: 2964-0131 p-ISSN-2964-1748

Available online at <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI SEKOLAH DI ERA DIGITAL

Uthi Fadhilah

Universitas Islam An Nur Lampung

uthifadhilah@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how national and regional education policies influence school administration systems, particularly in the context of information technology developments in the digital era. The main focus of this study is to identify the implications of education regulations such as the digitization of educational data, application-based management systems, and the demand for transparency and accountability in school administration management. This research employs a library research method by reviewing various literature sources such as books, scientific journals, government policy documents, and relevant previous studies. The findings indicate that education policies promoting digitalization and the use of information technology have a positive impact on the efficiency, accuracy, and accessibility of school administrative systems. However, the implementation of these policies still faces several challenges, especially related to the readiness of human resources, uneven technological infrastructure, and the need for training among administrative staff and teachers. Therefore, continued policy support focused on strengthening the digital capacity of schools is necessary.

Keywords: education policy, school administration, digitalization, digital era, library research

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan nasional dan daerah memberikan pengaruh terhadap sistem administrasi sekolah, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi di era digital. Fokus utama dari kajian ini adalah mengidentifikasi implikasi dari regulasi-regulasi pendidikan seperti digitalisasi data pendidikan, sistem manajemen berbasis aplikasi, dan tuntutan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi membawa dampak positif dalam efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas sistem administrasi sekolah. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan SDM, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kebutuhan pelatihan bagi tenaga administrasi dan guru. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan lanjutan yang berorientasi pada penguatan kapasitas digital sekolah secara menyeluruh.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, administrasi sekolah, digitalisasi, era digital, studi pustaka

PENDAHULUAN

Pendidikan di era modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Transformasi digital telah merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan ini adalah berubahnya sistem administrasi sekolah yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis digital. Perubahan ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pendidikan baik di tingkat nasional maupun daerah yang mendorong pemanfaatan teknologi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pendidikan.

Administrasi pendidikan merupakan jantung dari pengelolaan lembaga pendidikan. Menurut (Hilal Mahmud, 2015), administrasi pendidikan mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh proses pendidikan. Dalam konteks era digital, administrasi pendidikan dituntut untuk adaptif terhadap teknologi, sehingga sistem manajemen pendidikan dapat lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung digitalisasi pendidikan. Salah satunya adalah penerapan sistem pendataan berbasis teknologi seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik), aplikasi e-Raport, dan sistem informasi manajemen sekolah lainnya. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk membangun sistem pendidikan yang modern, transparan, dan terintegrasi. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi sistem administrasi digital tersebut.

Dalam teori administrasi publik, perubahan sistem administrasi akibat kebijakan akan sangat bergantung pada sejauh mana implementasi kebijakan tersebut didukung oleh aktor-aktor pelaksana, sumber daya yang tersedia, serta kondisi sosial-budaya di lapangan (Nugroho, 2021). Artinya, sebaik apapun sebuah kebijakan dirancang, tanpa kesiapan pelaksana dan dukungan infrastruktur yang memadai, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Salah satu aspek penting dalam kebijakan pendidikan digital adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Banyak di antara mereka yang belum memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mengelola sistem administrasi berbasis teknologi. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern dan berbasis teknologi.

Menurut teori *change management* (manajemen perubahan) yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, setiap proses perubahan, termasuk dalam sistem administrasi sekolah, harus melalui tiga tahap: *unfreezing* (pencairan), *changing* (perubahan), dan *refreezing* (pembekuan kembali) (Rusdinal & Afriansyah, 2023). Dalam konteks pendidikan, tahap pertama dapat diartikan sebagai kesadaran dan kesiapan terhadap perubahan teknologi. Tahap kedua adalah implementasi sistem digital, dan tahap ketiga adalah penguatan budaya kerja baru yang berbasis digital. Kajian dari (Iswahyudi et al., 2023) menekankan pentingnya digital governance dalam pendidikan, yaitu tata kelola pendidikan berbasis teknologi informasi yang mengedepankan prinsip inklusivitas, efisiensi, dan transparansi. Administrasi pendidikan tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi bagian dari proses manajerial yang menentukan arah dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan digital harus diarahkan tidak hanya pada penyediaan sistem dan infrastruktur, tetapi juga pada transformasi budaya kerja dan pola pikir birokrasi sekolah.

Dalam praktiknya, beberapa sekolah yang berada di wilayah pedesaan atau daerah tertinggal mengalami hambatan besar dalam mengimplementasikan sistem administrasi berbasis digital karena keterbatasan jaringan internet, perangkat keras, dan pelatihan SDM. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang bersifat nasional dan realitas di lapangan. Kesenjangan ini dapat berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan administrasi pendidikan yang terstandar dan terintegrasi.

Secara teoritis, pendekatan sistem dalam administrasi pendidikan menekankan pentingnya kesatuan komponen yang saling mendukung: input (kebijakan, SDM, sarana), proses (pelaksanaan administrasi), dan output (hasil pelayanan administrasi yang efektif). Kelemahan dalam salah satu komponen akan berdampak pada sistem secara keseluruhan (Mustari, 2022). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu didesain secara menyeluruh dan berorientasi pada keadilan digital (*digital equity*). Salah satu indikator keberhasilan kebijakan administrasi berbasis digital adalah peningkatan efisiensi kerja tata usaha sekolah, percepatan layanan akademik, serta kemudahan dalam pelaporan dan monitoring. Sistem seperti e-Raport, e-Kinerja, dan Dapodik sangat membantu jika dioperasikan secara optimal. Namun, banyak sekolah yang belum dapat memanfaatkan fitur-fitur tersebut secara maksimal karena keterbatasan pelatihan dan pembinaan teknis.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai manajer perubahan. Kepala sekolah harus mampu menjembatani antara kebijakan pemerintah dan kondisi faktual di sekolah. Kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam memimpin proses digitalisasi administrasi sekolah (Susanto, 2021). Tanpa kepemimpinan yang kuat, digitalisasi hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori di atas, dapat dilihat bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan dalam era digital sangat ditentukan oleh keselarasan antara perumusan kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM pendidikan. Maka dari itu, kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pendidikan digital terhadap sistem administrasi sekolah perlu dilakukan agar proses digitalisasi tidak hanya menjadi tuntutan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan dan administrasi sekolah berbasis digital. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan pemerintah seperti peraturan menteri dan surat edaran, laporan penelitian terdahulu, serta publikasi resmi dari lembaga pendidikan dan teknologi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pendidikan yang mendorong digitalisasi berdampak pada sistem administrasi sekolah. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji teori-teori yang relevan, perkembangan implementasi kebijakan, serta tantangan dan peluang yang muncul di lapangan sebagai implikasi dari perubahan administratif di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital dalam dunia pendidikan telah menjadi fokus utama kebijakan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu implikasi nyata dari kebijakan tersebut adalah modernisasi sistem administrasi sekolah melalui penerapan teknologi informasi. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan, seperti integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), e-Raport, Sistem Informasi Manajemen Sekolah

(SIMS), serta platform administrasi lainnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pendidikan nasional.

Digitalisasi administrasi sekolah yang dipicu oleh kebijakan ini memiliki dampak signifikan dalam mempercepat arus informasi, memperbaiki akurasi data, dan meningkatkan efisiensi kerja staf administrasi. Hasil temuan dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa sekolah yang telah menerapkan sistem administrasi berbasis digital mampu memangkas waktu pengolahan data dan mempercepat proses layanan, seperti pendaftaran siswa, pengelolaan keuangan, pelaporan akademik, hingga komunikasi dengan orang tua siswa.

Dari perspektif kebijakan publik, upaya digitalisasi pendidikan dapat dimaknai sebagai respons pemerintah terhadap kebutuhan modernisasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan berbagai peraturan turunannya memberikan legitimasi bagi penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu manajemen sekolah. Hal ini diperkuat dengan hadirnya program Merdeka Belajar yang mengedepankan fleksibilitas dan adaptasi teknologi dalam pengelolaan pendidikan. Meskipun kebijakan digitalisasi administrasi sekolah telah membawa banyak manfaat, hasil studi pustaka juga menyoroti tantangan besar dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut antara lain adalah keterbatasan akses teknologi di sekolah-sekolah pedesaan, minimnya pelatihan bagi tenaga administrasi dan guru, serta rendahnya literasi digital di sebagian kalangan pendidik. Ketimpangan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan implementasi antara sekolah di kota besar dan sekolah di wilayah tertinggal.

Beberapa studi menegaskan bahwa efektivitas kebijakan digital dalam sistem administrasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia. Guru dan tenaga tata usaha dituntut tidak hanya memahami perangkat digital, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem informasi yang kompleks secara mandiri. Tanpa adanya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, kebijakan yang dirancang ideal sering kali tidak dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan (Paramansyah & SE, 2020). Salah satu contoh keberhasilan implementasi kebijakan administrasi digital adalah penggunaan aplikasi Dapodik di sekolah-sekolah negeri. Aplikasi ini memungkinkan integrasi data peserta didik, guru, kurikulum, hingga sarana prasarana secara nasional. Dalam literatur yang dikaji, disebutkan bahwa Dapodik telah membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data dan mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih akurat dan efisien (Prabowo & Aimah, 2024).

Namun demikian, keluhan tentang penggunaan Dapodik juga muncul dari kalangan operator sekolah yang menganggap sistem ini terlalu rumit dan memakan waktu. Beberapa studi mencatat bahwa proses entri data Dapodik yang lambat dan sering mengalami error menyebabkan beban kerja operator meningkat, apalagi jika tidak diimbangi dengan pelatihan teknis dan pendistribusian tugas yang jelas. Ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi harus mempertimbangkan faktor manusia dalam setiap tahap implementasinya (Wafda, 2025).

Sistem administrasi berbasis digital juga menciptakan transparansi dalam pengelolaan sekolah. Orang tua siswa kini dapat memantau perkembangan belajar anak mereka melalui aplikasi e-Raport, melihat jadwal kegiatan sekolah, hingga melakukan komunikasi dengan guru secara daring. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menggeser paradigma administrasi sekolah dari sistem tertutup menjadi sistem yang terbuka dan partisipatif. Selain transparansi, digitalisasi juga mendukung prinsip akuntabilitas. Melalui sistem pelaporan berbasis web, seperti e-Kinerja dan aplikasi keuangan berbasis BOS, sekolah dituntut untuk membuat laporan secara real-time yang dapat dipantau oleh dinas pendidikan. Hal ini meminimalisir praktik manipulasi data dan mendorong pengelolaan yang profesional. Dengan demikian, kebijakan pendidikan digital menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola sekolah yang bersih dan bertanggung jawab.

Dari sisi teori administrasi, temuan ini sesuai dengan pandangan (Fayol, 1916) bahwa efisiensi dan efektivitas dalam manajemen dapat dicapai melalui sistem kerja yang terorganisasi, terstruktur, dan berbasis data. Sistem digitalisasi administrasi secara tidak langsung menginternalisasi prinsip-prinsip manajemen modern ke dalam praktik kerja sekolah, seperti pembagian tugas, pelaporan berkala, dan kontrol manajerial. Dalam perspektif manajemen perubahan (*change management*), kebijakan pendidikan digital dapat diposisikan sebagai proses perubahan struktural dan kultural di lingkungan pendidikan. Sekolah yang sebelumnya mengandalkan sistem manual dipaksa untuk beradaptasi dengan sistem digital yang lebih cepat dan kompleks. Perubahan ini tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga perubahan sikap, nilai, dan kebiasaan kerja seluruh warga sekolah.

Salah satu strategi yang dianjurkan dalam berbagai literatur untuk memperkuat implementasi kebijakan digital adalah pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Pelatihan

tidak hanya terbatas pada teknis pengoperasian sistem, tetapi juga pada manajemen data, keamanan informasi, dan etika digital. Dengan begitu, proses digitalisasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga substansial.

Hasil studi pustaka juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan digital. Pemerintah daerah yang proaktif biasanya menyediakan anggaran khusus untuk infrastruktur TIK, memfasilitasi pelatihan guru, dan membentuk tim pendamping implementasi teknologi. Kolaborasi ini menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan digital dalam sistem administrasi pendidikan. Dalam studi lain disebutkan bahwa penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin digital sangat berpengaruh terhadap keberhasilan transformasi administrasi. Kepala sekolah yang melek teknologi cenderung mendorong inovasi, membangun budaya kerja digital, serta memberikan dukungan moril dan material kepada stafnya (Suprayitno, 2020). Oleh karena itu, pelatihan kepemimpinan digital menjadi salah satu kebutuhan mendesak di tengah tuntutan kebijakan digitalisasi pendidikan.

Tantangan lainnya yang banyak dibahas dalam literatur adalah terkait keamanan data (*data security*) dan perlindungan privasi. Dalam beberapa kasus, penggunaan sistem digital yang tidak dilindungi dengan baik berpotensi menyebabkan kebocoran data siswa dan guru. Oleh karena itu, implementasi kebijakan administrasi digital juga harus disertai dengan sistem keamanan informasi yang memadai dan regulasi perlindungan data. Studi pustaka juga mencatat bahwa kebijakan digital di bidang administrasi dapat mengurangi beban birokrasi. Sekolah tidak lagi harus mengirim dokumen fisik ke dinas pendidikan secara manual, karena semua dapat dilakukan melalui sistem online. Ini berarti pengelolaan waktu menjadi lebih efisien dan pegawai dapat memfokuskan energinya pada kegiatan yang bersifat strategis dan pembinaan mutu pendidikan.

Meskipun demikian, literatur juga menyatakan bahwa kebijakan digital bisa menjadi beban baru jika tidak diiringi dengan simplifikasi proses (Prasojo, 2023). Banyak guru dan operator sekolah merasa terbebani oleh banyaknya aplikasi berbeda yang harus diakses dan dilaporkan secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa integrasi sistem menjadi salah satu pekerjaan rumah penting bagi pemerintah agar kebijakan digitalisasi benar-benar efisien dan tidak menambah beban kerja. Kajian lain menunjukkan bahwa digitalisasi sistem administrasi juga membuka peluang pengembangan profesional bagi staf

sekolah. Dengan keterlibatan dalam pengelolaan sistem digital, banyak guru dan tenaga kependidikan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu mengembangkan kompetensi baru yang berguna dalam pengembangan karier mereka.

Berdasarkan analisis temuan dalam berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan dalam mendigitalisasi administrasi sekolah bukan hanya ditentukan oleh perangkat lunak atau sistem yang digunakan, melainkan oleh keterpaduan antara kebijakan, pelaksana, dan dukungan teknis yang tersedia. Dengan kata lain, transformasi digital dalam pendidikan harus bersifat sistemik dan berkelanjutan. Keseluruhan pembahasan di atas menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di era digital memiliki implikasi mendalam terhadap sistem administrasi sekolah. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar untuk reformasi tata kelola pendidikan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun di sisi lain, tantangan struktural dan kultural harus diatasi secara kolaboratif agar kebijakan tersebut dapat benar-benar memberikan dampak positif dan merata bagi semua satuan pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan nasional dan daerah yang mendorong digitalisasi sistem administrasi sekolah telah membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pendidikan di era digital. Studi pustaka yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Melalui pemanfaatan berbagai aplikasi dan sistem informasi berbasis teknologi, proses administrasi yang sebelumnya manual menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi secara sistematis. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan dukungan kelembagaan. Ketimpangan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital tenaga administrasi dan guru, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini, terutama di daerah-daerah yang belum berkembang secara digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang tidak hanya fokus pada pengadaan perangkat digital, tetapi juga pada penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi yang lebih sederhana, dan pembangunan budaya kerja berbasis teknologi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah sangat diperlukan untuk memastikan transformasi digital dalam administrasi

pendidikan berjalan merata, berkelanjutan, dan berdampak positif terhadap kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fayol, H. (1916). *Administration*. London: Pitman.
- Hilal Mahmud, M. M. (2015). *Administrasi Pendidikan (menuju sekolah efektif)*. Penerbit Aksara TIMUR.
- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mustari, M. (2022). *Administrasi dan manajemen pendidikan sekolah*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Paramansyah, H. A., & SE, M. M. (2020). *Manajemen pendidikan dalam menghadapi era digital*. Arman Paramansyah.
- Prabowo, G., & Aimah, S. (2024). Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru Berbasis Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(2), 159–168.
- Prasojo, E. (2023). *Isu-isu kontemporer kebijakan dan governansi publik di Indonesia*. Prenada Media.
- Rusdinal, M. P., & Afriansyah, H. (2023). *Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi (Jilid 1)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Suprayitno, A. (2020). *Menyusun PTK era 4.0*. Deepublish.
- Susanto, H. P. (2021). *Best Practices Manajemen Sekolah*. Penerbit Tsaqiva.
- Wafda, A. (2025). *Aspect-Based Sentiment Analysis terhadap Cuitan Platform X tentang Kurikulum Merdeka Menggunakan IndoBERT*. Universitas Islam Indonesia.